

BAB I

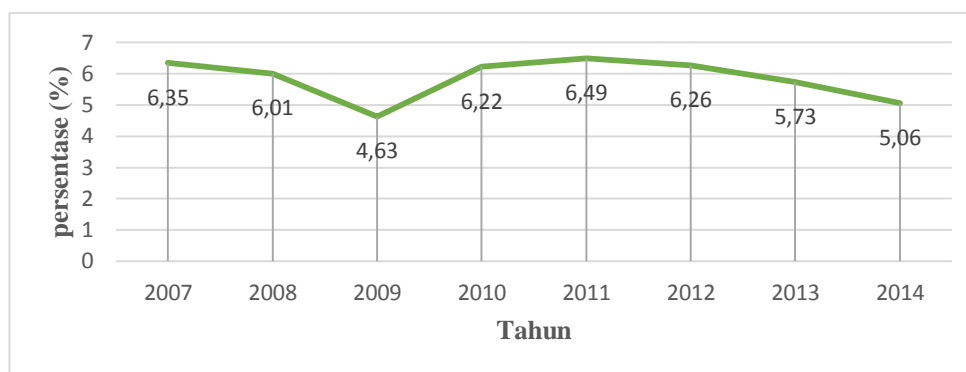
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aktivitas pembangunan dan perekonomian di setiap daerah atau wilayah saat ini semakin tumbuh dan berkembang pesat seiring dinamika kehidupan yang makin tinggi kondisi ini juga berdampak pada persaingan dalam dunia usaha dan industri yang semakin ketat . Menurut Mankiw (2007: 182) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun.

Dengan demikian statistik pendapatan regional merupakan gambaran dari perekonomian suatu daerah dan akan berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang perencanaan dan pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, pembelanjaan secara regional, perumusan perpajakan, keuangan, tenaga kerja kategorial dan kebijaksanaan ekonomi oleh pemerintah dan swasta.

Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun suatu Negara dapat di lihat dari Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan. Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2007-2014 tersaji dalam sebuah grafik 1.1 di bawah ini :



Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2014
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 4,63 persen yang semula mencapai 6,01 persen kemudian di akhir pengujung tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sehingga hanya sanggup mencapai angka 5,06 persen di tahun 2014 hal ini di akibatkan dari Kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN

memberikan konsekuensi kepada kenaikan harga BBM dimana kebijakan ini juga untuk mendorong penggunaan energi alternatif dan mengurangi tekanan APBN akibat subsidi yang semakin membengkak untuk membayar impor BBM serta pelemahan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika yang terjadi pada triwulan keempat tahun 2013 dengan puncaknya di bulan Desember 2013 sehingga berimbas terhadap kenaikan harga barang konsumsi yang berasal dari impor, Kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terjadi pada paruh kedua tahun 2013 memberikan efek terhadap peningkatan suku bunga untuk kredit konsumsi, modal kerja dan investasi, sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi aktivitas konsumsi dan dunia usaha dalam menjalankan usahanya dan melakukan investasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan global yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha, rumah tangga, serta menyerpa aspek penawaran dan permintaan di Provinsi Jawa Barat . Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu, salah satu faktor penting kondisi makro ekonomi provinsi Jawa Barat adalah peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2007 - 2017 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat terbilang positif terlihat pada enam tahun terakhir mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,56% sebagaimana grafik 1.2 berikut :



Grafik 1.2

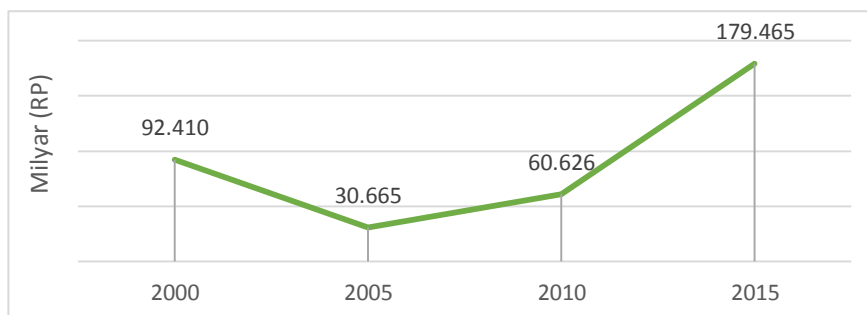
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2017

Sumber ; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 6,62 persen menjadi 4.37 persen hal diakibatkan fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan global yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha, rumah tangga, serta menyerpa aspek penawaran dan permintaan di provinsi Jawa Barat, kemudian tahun 2014 terlihat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat kembali mengalami penurunan dari 6,33 persen menjadi 5,09 persen hal ini disebabkan kurangnya tingkat produktivitas yang di akibatkan oleh beberapa faktor eksternal perekonomian nasional yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi di akhir tahun 2013. Kemudian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara dalam proses

pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan Mukhlis (2015: 122). Sedangkan menurut Todaro (2006: 92) salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal. Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kegiatan produksi . Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi . Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap daerah senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara . Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia. terlihat dari data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan sektor ekonomi tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015 sebagai berikut :



Grafik 1.3

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan data di atas terlihat pada tahun 2005 realisasi penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan dari 92,410 triliun menjadi 30,665 triliun hal ini di karenakan kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan, terutama meningkatnya harga minyak dunia dan siklus pengetatan kebijakan moneter global menyebabkan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro mengalami gangguan yang cukup berarti. Ketergantungan kegiatan ekonomi domestik pada impor menyebabkan kondisi perekonomian secara struktural cukup rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Ekspansi ekonomi menjadi lebih lambat ketika kegiatan investasi terkendala oleh membumbungnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM dan belum tuntasnya berbagai peraturan-peraturan di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kegiatan konsumsi juga mengalami penurunan karena melemahnya daya beli masyarakat dan mulai meningkatnya suku bunga. Di sisi lain, kinerja ekspor juga belum begitu menggembirakan seiring dengan kondisi permintaan global yang menurun dan melemahnya daya saing.

Kemudian provinsi Jawa Barat dengan luas 35.337,76 km² menurut data BPS merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan investasi dan merupakan salah satu provinsi dengan minat penanaman modal yang cukup tinggi terbukti dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan tingkat provinsi kurun waktu 2006-2015 mencapai 32% PMDN Indonesia dengan jumlah proyek 2.174 atau Rp 62,4 triliun kemudian pada kuartal I

2019 menurut data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia mengumumkan realisasi investasi pada kuartal I 2019 mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi investasi ini mencapai 24,6% dari target BKPM tahun ini sebesar Rp 792 triliun dimana Provinsi Jawa Barat menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam peningkatan investasi yaitu sebesar 19,1% atau Rp 37,3 triliun, dimana Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 87,2 triliun, naik 14% dibandingkan kuartal I 2018 sebesar 76,4 triliun . adapun secara lebih terperinci dapat dilihat Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017 dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini :



Grafik 1.4

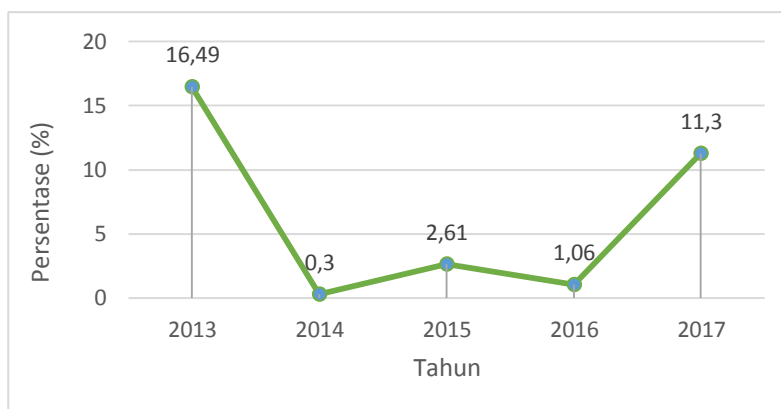
Data Realisasi PMDN Provinsi Jawa Barat tahun 2006 - 2017

Sumber : BPS provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2008 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari RP113,47 milyar Menjadi Rp42.89 milyar kemudian pada tahun 2013 Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri provinsi jawa barat kembali mengalami penurunan dari

Rp113,84 menjadi Rp90,06 milyar hal ini disebabkan penundaan penundaan yang dilakukan investor sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar minyak yang dilakukan Pemerintah.

Disamping menggali sumber penanaman modal dalam negeri dan pembiayaan asli daerah, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) Penanaman modal asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 penanaman modal asing di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan berbagai kondisi perekonomian , berikut gambaran realisasi penanaman modal asing di Indonesia dapat terlihat pada grafik 1.5 di bawah ini :



Grafik 1.5

Presentase Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2013-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia di akibatkan dari ketidakstabilan ekonomi yaitu inflasi dan ketidakstabilan politik telah memicu pelarian modal (*capital outflow*) dalam skala yang cukup tinggi hingga mencapai US\$20,09 milyar. Ketidakstabilan tersebut juga mengakibatkan banyak pengusaha meninggalkan Indonesia, terhambatnya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri, dan ditanggungkannya banyak rencana investasi asing di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 Realisasi Penanaman Modal asing Mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana mencapai peningkatan sebesar 11,3 persen atau tercatat mencapai US\$19,4 miliar. yang semula US\$16,1 miliar pada tahun 2016 , dimana provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang paling banyak berkontribusi dalam peningkatan nilai Penanaman Modal Asing di Indonesia yang mencapai US\$5,47 miliar . Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal realisasi Penanaman Modal Asing di provinsi Jawa barat pada tahun 2006-2017 dapat dilihat pada grafik 1.6 berikut ini :

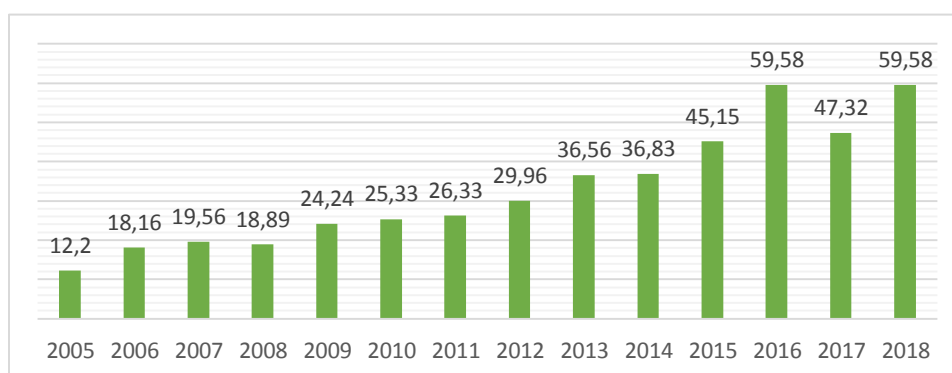


Grafik 1.6

Realisasi Penanaman Modal Asing Di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2007 (dalam US\$)

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan atau penambahan infrastruktur dan melakukan penambahan aset perusahaan BUMN seperti Pertamina. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti tertera pada grafik 1.7 dibawah ini menunjukkan gambaran belanja modal yang dilakukan pemerintah dari tahun 2005-2018 sebagai berikut :

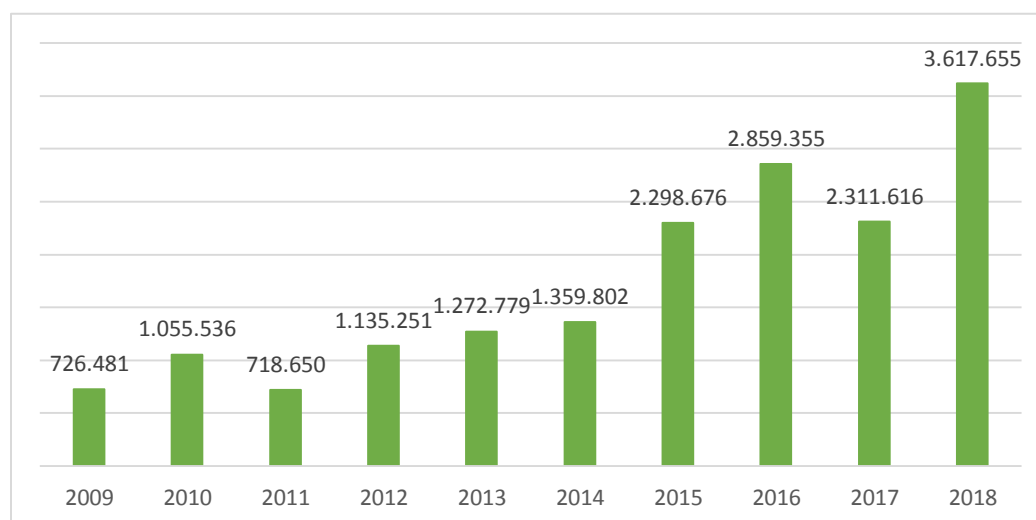


Grafik 1.7

Realisasi Belanja Modal Pemerintah tahun 2005-2018 (Rp Triliun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan data di atas pada tahun 2006 terjadi peningkatan Belanja modal yang dilakukan pemerintah yang semula Rp12,2 triliun menjadi Rp18,16 triliun dimana dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta beberapa penambahan modal perusahaan BUMN guna merangsang pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian peningkatan paling signifikan terlihat di tahun 2016 dimana terjadi peningkatan sebesar 31,96 persen atau 14,43 triliun. Sementara itu Belanja modal yang di keluarkan pemerintah provinsi Jawa Barat berdasarkan APBD tahun 2009-2018 dapat di lihat pada table 1.8 berikut :



Tabel 1.8

Belanja Modal Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2018

Sumber : BPKAD provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas dapat terlihat pada tahun 2010 Belanja Modal Provinsi Jawa barat mengalami peningkatan dari Rp726,48 milyar menjadi Rp1,05 triliun, kemudian di tahun 2015 melonjak naik sekitar 69,09 persen atau sekitar Rp939

milyar kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan 23,71 persen atau sekitar Rp548 milyar dan di pengujung tahun 2018 Belanja Modal Pemerintah provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan mencapai Rp3,61 triliun .

Terkait dengan beberapa fakta Permasalahan yang saling berhubungan antara penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi . maka perlu dilakukan upaya upaya untuk meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya baik itu investor lokal maupun asing , serta mempermudah akses investasi . upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di provinsi Jawa Barat

Berdasarkan uraian permasalahan yang teridentifikasi diatas, penulis tertarik menggali dan meneliti aspek-aspek yang saling berhubungan tersebut dalam sebuah judul, yaitu : **Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2017**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, teridentifikasi beberapa permasalahan berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat

2. Bagaimana Pengaruh Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing , belanja modal terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat , baik secara parsial maupun simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Perkembangan Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat
2. Mengetahui Pengaruh Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing , belanja modal terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, di antaranya yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman lebih mendalam, khusus nya tentang penanaman modal dalam negeri , penanaman modal asing, belanja modal, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi Universitas, sebagai salah satu informasi tentang permasalahan yang terkait dengan penanaman modal dalam negeri , penanaman modal asing, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat, yang bisa

dijadikan kajian perkuliahan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat sebagai masukan berharga, referensi, dan bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan guna mempermudah akses penanaman modal dari para Investor baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Serta menentukan kebijakan dalam pengeluaran pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi Peneliti/Akademisi lain, sebagai bahan acuan untuk kelengkapan studi empiris yang sudah ada dan menjadi masukan bagi penelitian sejenis, khususnya yang terkait dengan permasalahan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek tentang pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, lokasi atau sumber data yang dijadikan objek penelitian adalah data sekunder yang berasal dari beberapa sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal daerah provinsi Jawa Barat , DPMPTSP provinsi jawa barat ,

BPKAD provinsi jawa barat, Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Jawa Barat, serta sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian.